



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
UNIT KERJA : DINAS PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ASRAR A. AMIR**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **490787**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.780.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/95 m2 di KAB / KOTA BULUKUMBA, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 432 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA BULUKUMBA, HASIL SENDIRI Rp. 730.000.000
4. Tanah Seluas 3962 m2 di KAB / KOTA BULUKUMBA, WARISAN Rp. 370.000.000
5. Tanah Seluas 9466 m2 di KAB / KOTA BULUKUMBA, WARISAN Rp. 730.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 210.000.000

1. MOTOR, YAMAHA SOUL Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SEON Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOBIL, HONDA BRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 91.650.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 36.955.167



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.118.605.167
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.118.605.167

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.